

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Dalam pandangan Islam kemiskinan sepenuhnya adalah masalah struktural karena Allah telah menjamin rizki setiap makhluk yang akan di ciptakannya seperti dalam firman Allah:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شَرِكَايَكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ دَالِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

“Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.(Ar-rum ayat 40)

Jika melihat dari pandangan Islam, maka jelas kemiskinan dalam Islam sebetulnya tidak ada karena Allah menjamin rizki setiap makhluknya, namun rasa cukup atau tidak itu bergantung kepada seberapa besar manusia dapat mensyukurinya dan seberapa besar usahanya dalam mencari penghidupan yang lebih baik.¹

¹ [Http://ViewIslamarticals.Ac.Id/](http://ViewIslamarticals.Ac.Id/), Kemiskinan dalam Islam, Denrita

Menurut para ahli, kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan, dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.²

Selain itu dimensi-dimensi kemiskinan juga saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya. Dan aspek lainnya dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif. Kita sering mendengar istilah kemiskinan perdesaan, kemiskinan perkotaan, dan sebagainya. Namun, hal tersebut bukan berarti hanya “desa” atau “kota”-nya yang mengalami kemiskinan (kemiskinan “desa” atau “kota” salah satunya diindikasikan oleh pendapatan daerah yang begitu rendah), namun juga orang-orang atau penduduk (manusianya) yang menderita kemiskinan.

Disisi lain, kemiskinan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau

² Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2010) h. 299

kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Secara garis besar definisi miskin dapat dipilah menjadi dua aspek, yaitu aspek primer yaitu berupa miskin aset (harta), organisasi sosial politik, pengetahuan, keterampilan, dan aspek sekunder, yaitu berupa miskin terhadap jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi.

Menurut Ravallion kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin itu umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.³

Menurut Kuncoro kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Adapun Kartasmita mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Hal tersebut semada dengan yang dikatakan Friedmann bahwa kemiskinan sebagai akibat dari ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosialnya.

Berbagai definisi yang telah disebutkan sebelumnya dapat dijelaskan bahwa fenomena kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan yang dialami individu, kelompok, dan keluarga untuk memenuhi

³ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*,...h. 299

kebutuhan standar hidup minimum. Contohnya seperti pendidikan yang rendah, sehingga banyak yang menganggur dan tidak bekerja serta banyak warga yang belum mampu mengakses program maupun pelayanan pemerintah sehingga sulit memenuhi kebutuhannya.⁴

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- c. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

⁴ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*,...h. 2

- d. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
- b. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.⁵

2. Penyebab Kemiskinan

Ada tiga penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi, yaitu:

- a. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya sehingga menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.
- b. Kemiskinan timbul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia.
- c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketika penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

⁵ Fatkhul Mufid Cholili, "Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terhadap Jumlah Penduduk Miskin", Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang (2014), h. 4

3. Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai makna yang luas dan memang tidaklah mudah untuk mengukurnya. Namun, dalam bagian ini akan dijelaskan dua macam ukuran kemiskinan yang paling umum digunakan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

a. Kemiskinan Absolut

Dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik, seperti makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga oleh tingkat kemajuan suatu negara, dan berbagai faktor ekonomi lainnya.⁶

b. Kemiskinan Relatif

Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar namun masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut masih dianggap miskin. Hal ini terjadi

⁶ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, Bandung, Alfabeta, (2014), h. 79

karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari pada lingkungan orang yang bersangkutan.

Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan jika tingkat hidup masyarakatnya berubah. Konsep ini merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absolut, dan karena konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis, maka kemiskinan akan selalu ada.⁷

1. Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan ada bermacam-macam yakni: tingkat konsumsi beras perkapita pertahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, kebutuhan fisik minimum (KFM), dan tingkat kesejahteraan.

a. Tingkat konsumsi beras

Sajogyo menggunakan tingkat konsumsi beras perkapita sebagai indikator kemiskinan. Untuk daerah perdesaan, penduduk dengan konsumsi beras kurang dari 240 kg perkapita pertahun bisa digolongkan miskin. Sedangkan untuk daerah perkotaan adalah 360 kg perkapita pertahun.⁸

b. Tingkat pendapatan

BPS tahun 2008 menetapkan garis kemiskinan (kapita/bulan) perdesaan di Jawa Barat sebesar Rp.155.367,- sedangkan di perkotaan sebesar Rp. 190.824,-. Perbedaan ini terjadi karena harga-harga kebutuhan dasar minimum di perdesaan yang relatif lebih kecil daripada di perkotaan.

c. Tingkat kesejahteraan sosial

⁷ Subandi, *Ekonomi Pembangunan Bandung*, Alfabeta, (2014), h. 80

⁸ Subandi, *Ekonomi Pembangunan, ...*h. 80

Selain pendapatan dan pengeluaran, ada berbagai komponen tingkat kesejahteraan yang lain yang sering digunakan. Pada publikasi UN yang berjudul *International Definition and Measurement of levels of living: An Interim Guide* disarankan 9 komponen kesejahteraan yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan.⁹

Tingkat kemiskinan Banten cukup rendah apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pada September 2015, tingkat kemiskinan di Provinsi Banten tercatat sebesar 5,75 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 690,67 ribu jiwa. Secara nasional, tingkat kemiskinan Banten berada pada posisi terendah kelima setelah DKI Jakarta (3,6%), Bangka Belitung (4,83%), Kalimantan Selatan (4,72%) dan Bali (5,25%). Rendahnya tingkat kemiskinan di Banten bukan berarti masalah kemiskinan tidak menjadi prioritas utama. Pengentasan kemiskinan tetap menjadi program prioritas, karena hidup yang layak menjadi hak semua orang dan hal ini yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Provinsi Banten.¹⁰

2. Kebijakan untuk mengurangi kemiskinan

a. Kapital dan Kredit

Di negara-negara berkembang para penduduk miskin hidup dari men jual tenaganya dan si kaya dari retum kepemilikan properti mereka. Kemiskinan penduduk miskin seperti telah diterangkan dalam teori lingkaran setan

⁹ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, Bandung, Alfabeta, (2014) h. 81

¹⁰ Badan Pusat Statistik-Provinsi Banten *Laporan Eksekutif Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten September 2015* (Banten,2015) h. 3

kemiskinan turut membatasi kemampuan mereka untuk berinvestasi, seperti kemampuan untuk membeli varietas bibit baru, pupuk buatan, peralatan pertanian moderen, atau mengirim anak-anak mereka ke sekolah yang bagus, yang akan berujung pada kekalnya kemiskinan mereka.

b. Pendidikan dan Training

Investasi dalam pendidikan, training dan bentuk-bentuk human capital lainnya akan menghasilkan aliran pendapatan sepanjang waktu. Pendidikan dasar dan universal yang gratis merupakan jalan utama meredistribusi human capital untuk keuntungan bagi mereka yang relatif miskin.

c. Program Perluasan Kesempatan Kerja

Pengangguran, fenomena besar di perkotaan negara-negara berkembang, mempunyai pengaruh langsung pada distribusi pendapatan. Beberapa kebijakan telah dibuat untuk mengurangi pengangguran, misalnya ekspansi industri, skema perluasan kesempatan kerja publik, produksi yang lebih padat karya di sektor manufaktur, pengurangan distoris harga faktor produksi, pembangunan ekonomi dan jasa sosial yang lebih besar di daerah perdesaan, sistem pendidikan yang lebih relevan, konsistensi yang lebih tinggi antara kebijakan pendidikan dengan perencanaan ekonomi, optimasi mekanisme pasar dalam penentuan tingkat harga dan upah.

d. Kesehatan dan Nutrisi

Kondisi tidak sehat dan kekurangan makanan membatasi kesempatan para pekerja untuk memperoleh nafkah. Subsidi pangan dan kesehatan akan meningkatkan pendapatan kaum miskin, meningkatkan kesehatan dan nutrisi, memungkinkan orang untuk bekerja lebih lama dalam seharinya, dan meningkatkan efektifitas kerjanya.¹¹

e. Riset dan Teknologi

Manfaat riset dan teknologi baru dalam mengurangi kemiskinan lebih tampak di pertanian. Pengenalan varitas gandum dan padi unggul revolusi hijau telah meningkatkan suplai makanan dan mengurangi harga makanan bagi kaum miskin, dan meningkatkan tingkat upah (meskipun juga mengurangi pendapatan sebagian petani kecil).

f. Migrasi

Proses pembangunan lebih banyak menciptakan pekerjaan sektor industri di perkotaan, sehingga orang-orang berpindah ke kota. Standar kehidupan migran tersebut, meskipun rendah, cenderung berada diatas teman-temannya yang miskin yang masih tinggal di perdesaan. Pada umumnya para pekerja kota mengirim uangnya kerumah sehingga meningkatkan kesejahteraan kaum miskin di perdesaan. Yang harus dihindarkan adalah jumlah migrasi yang melebihi kapasitas sosial.

¹¹ Abdul Hakim, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII) h.223

g. Tekanan pada Kelompok Target

Strategi yang lain untuk mengentaskan orang miskin adalah dengan mengarahkan program-program tertentu untuk kelompok-kelompok termiskin.

h. Perang yang Terintegrasi terhadap Kemiskinan

Sebuah studi yang dilakukan oleh Irma Adelman dan Sherman Robinson mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh sepotong-sepotong sulit untuk bisa mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan yang muncul dari proses pembangunan. Hanya mobilisasi total kebijakan pemerintah terhadap program-program menolong kaum miskin secara langsung yaitu sebuah perang terhadap kemiskinan yang akan berhasil mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan meningkatkan pendapatan absolut.¹²

3. Teori Kemiskinan Struktural Fungsional

Menurut teori fungsional yang dinyatakan George Ritzer bahwa semua penganut teori ini berkecenderungan untuk memusatkan perhatiannya pada fungsi suatu faktor sosial terhadap faktor sosial. Sementara dalam teori yang sama Thomas O'dea menyatakan bahwa teori fungsional adalah segala yang tidak berfungsi akan lenyap dengan sendirinya. O'dea memisalkan agama, sejak dulu sampai saat ini masih ada, jelas bahwa agama mempunyai fungsi bahkan memerankan sejumlah fungsinya.

¹² Abdul Hakim, *Ekonomi Pembangunan...*, h.224

Berangkat dari teori tersebut dapat dinyatakan bahwa kemiskinan salah satu unsur dalam sistem sosial, artinya keberadaan orang miskin dapat menjaga eksistensi dari unsur lain dalam suatu sistem, dengan perkataan lain bahwa keberadaan orang miskin memperkuat posisi mereka sebagai orang kaya. Kemiskinan akan tetap ada sampai fungsi kemiskinan itu hilang dalam sosial. Menurut Herbet Gans, kemiskinan memiliki fungsional dalam sistem. Dalam sistem sosial di Amerika, Gans melihat adanya lima belas fungsi kemiskinan yang direduksi menjadi empat kriteria, masing-masing fungsi kemiskinan, meliputi ekonomi, sosial, kultural, dan politik. Sedangkan Zastrow berpendapat bahwa sedikitnya terdapat dua belas fungsi kemiskinan bagi kelompok kaya.¹³

Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem, di mana masing-masing subsistem saling ketergantungan dan mempunyai fungsi masing-masing. Teori ini memandang kemiskinan sebagai akibat dari ketidakberfungsian ekonomi. Perkembangan industrialisasi telah menghancurkan sistem ekonomi. Kemiskinan disebabkan oleh sistem, dimana ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan, dimana struktur yang kuat mengakibatkan yang lemah menjadi tak berdaya karena kekuasaannya. Berbicara tentang teori ini pastinya terkait dengan struktur masyarakat, status, dan stratifikasi manusia. Fungsionalisme kemasyarakatan (*Societal Functionalism*), sebagai salah satu pendekatan fungsionalisme struktural. Perhatian utama dari fungsionalisme kemasyarakatan ini adalah struktur sosial dan institusi masyarakat secara luas,

¹³ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan,...* h. 22

hubungannya dan pengaruhnya terhadap anggota masyarakat (individu/pemain).

Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Secara ekstrem teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, apabila ada suatu konflik pada masyarakat, maka penganut teori fungsionalisme struktural ini memusatkan perhatiannya pada masalah tersebut dengan tujuan untuk menyelesaikan agar tetap dalam keseimbangannya.¹⁴

4. Perspektif Kemiskinan menurut Teori Struktural Fungsional

Dalam mempelajari kemiskinan struktural-fungsional dapat dilihat dari berbagai perspektif berikut ini.

a. Perspektif patologi sosial (Durkheim)

Kemiskinan dipandang sebagai penyakit sosial, dimana orang gagal berfungsi sosial dalam peran yang diharapkan struktur sosial yang terus berubah sehingga tertekan oleh struktur yang lain. Orang-orang menjadi miskin karena gagal mengikuti atau gagal beradaptasi dengan kondisi yang selalu berubah tersebut sehingga mengganggu keberfungsian, seperti akses akan informasi terbatas. Hal inilah yang membuat orang tetap menjadi miskin karena kalah bersaing (disfungsi).

¹⁴ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan...*, h. 23

b. Perspektif disorganisasi sosial/disintegrasi sosial (parson)

Kemiskinan disebabkan kesalahan dalam aturan, salah mengorganisir serta kebijakan yang tidak memihak pada orang miskin akibat dari penyelewengan institusi karena kurangnya kontrol sosial. Disorganisasi terjadi ketika masyarakat seluruh/sebagiannya mengalami ketidaksempurnaan dalam mengorganisasi/mengintegrasikan tujuan, harapan-harapan, dan aturan-aturan serta tidak menjaga stabilitas atau keseimbangan. Hal ini mungkin terjadi karena perubahan begitu cepat dan orang tidak mampu mengikutinya, sehingga kemungkinan terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat dan orang-orang miskin tetap miskin dan yang kaya tetap kaya.

c. Perspektif penyimpangan perilaku

Berkaitan dengan patologi sosial, perspektif ini menimbulkan orang berontak dan melakukan penyimpangan sebagai wujud perlawanan dan mencari perhatian untuk menyesuaikan diri dengan situasi sosial. Kemiskinan muncul karena adanya perbedaan nilai-nilai dan harapan-harapan yang dimiliki oleh seseorang dengan nilai-nilai dan harapan-harapan kelompok/masyarakat tempat ia tinggal sehingga ia berperilaku¹⁵ menyimpang. Perilaku menyimpang tersebut yang menyebabkan ia tidak dapat memanfaatkan sumber-sumber kesejahteraan yang

¹⁵ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan...*, h. 27

terdapat pada masyarakat tempat ia berada, sehingga ia miskin.

Dalam pandangan teori ini, kemiskinan diakibatkan oleh ketidakberfungsian sistem. Menurut para penganut fungsional, cara terbaik untuk menyelesaikan kemiskinan adalah dengan cara penyesuaian untuk memperbaiki ketidakberfungsian tersebut.

Setidaknya penyebab kemiskinan terkait dengan tiga dimensi, sosial politik. Dimensi ekonomi, yaitu kurangnya sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan orang. Baik secara finansial atau segala jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Dari dimensi sosial budaya, yaitu adanya kekurangan jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan agar produktifitas seseorang meningkat. Sementara dimensi sosial politik melihat rendahnya derajat akses terhadap kekuatan yang mencakup tatanan sistem sosial politik. Tiga dimensi tersebut secara eksplisit maupun implisit menekankan bahwa strukturlah setidaknya-tidaknya yang menjadi penyebab kemiskinan.¹⁶

Sebagai sebuah teori atau metode berpikir, strukturalisme tentu memiliki kelebihan dan kekurangan seperti teori-teori lainnya. Teori ini kelebihanannya dapat dengan mudah mengidentifikasi faktor-faktor dan indikator kemiskinan berikut dengan upaya pengentasannya. Kemudahan tersebut karena teori ini menggunakan pendekatan struktural yang selalu menitikberatkan pada kesalahan sistem, hilangnya kesempatan

¹⁶ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan...*, h. 28

seseorang untuk mengakses sumber daya ekonomi dan produksi, ketidakadilan dan ketidakmerataan distribusi aset dan hasil produksi serta lainnya.

Sementara kelemahan teori ini tidak dapat melihat indikator atau variabel-variabel lain yang tidak disebabkan oleh sistem. Teori ini terlalu asyik dengan sistem sehingga melupakan atau tidak mampu mengidentifikasi variabel-variabel yang terdapat pada individu atau pribadi “si miskin”. Teori ini juga sulit menerima perubahan sebagai penyebab kemiskinan yang mengakibatkan antara perubahan dan kemiskinan merupakan sesuatu yang berbeda dan terpisah satu sama lain.¹⁷

B. Indeks Pembangunan Manusia

1. Definisi Indeks Pembangunan Manusia

Menurut United Nations Development Programme (UNDP) dalam publikasi Human Development Report 1991, pembangunan manusia adalah suatu “proses meningkatkan pilihan yang lebih banyak bagi manusia untuk hidup (a process of increasing people options) atau proses peningkatan kemampuan manusia”.

Proses tersebut dikonsentrasikan secara merata pada peningkatan formasi kemampuan manusia dengan cara investasi pada diri manusia. Selain itu, dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan manusia melalui penciptaan kerangka partisipasi untuk menghasilkan pendapatan dan peningkatan kesempatan kerja.

Adapun peningkatan pilihan bagi manusia mencakup tiga hal, yaitu menikmati kehidupan yang sehat dalam jangka waktu

¹⁷Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan...*, h. 29

yang relatif lama, mempunyai pengetahuan, pekerjaan, dan pendapatan untuk mendukung kebutuhan hidup sesuai dengan standar yang memadai. Dalam laporan yang sama, kemajuan pembangunan manusia menurut UNDP diukur dengan menggunakan Human Development Index (HDI) atau Indeks pembangunan manusia (IPM). IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi kebutuhan dasar manusia, yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM ini selanjutnya diadopsi oleh berbagai negara termasuk Indonesia, tentunya dengan melakukan berbagai modifikasi yang disesuaikan dengan ketersediaan data di negara masing-masing.

Dalam konteks Indonesia, saat itu IPM merupakan Indeks komposit yang dihitung berdasarkan tiga indikator, yaitu: umur panjang dan sehat menggunakan ukuran harapan hidup pada saat lahir, Pengetahuan sebagai ukurannya adalah kombinasi dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak menggunakan pengeluaran per kapita riil setahun disesuaikan sebagai ukuran.¹⁸

2. Komponen Indeks Pembangunan Manusia

a. Umur Panjang dan Sehat

Sebenarnya cukup banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat, namun dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara umum, maka UNDP memilih indikator angka harapan hidup waktu lahir (life expectancy at birth) sebagai salah satu

¹⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten 2014*, h. 25

komponen untuk penghitungan IPM. Angka harapan hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Secara teori, semakin baik kesehatan seseorang maka kecenderungan untuk bertahan hidup lebih lama akan semakin tinggi dan semakin buruk kesehatan maka umur kehidupan akan semakin pendek, dengan demikian angka harapan hidup diharapkan dapat menggambarkan dimensi umur panjang dan sehat. angka harapan hidup (AHH) dihitung melalui pendekatan tak langsung (indirect estimation), dengan menggunakan data anak lahir hidup dan anak masih hidup. Penghitungan angka harapan hidup menggunakan paket program mortpack dengan metode trussel dan model west. Pemilihan metode trussel dengan model west ini dilakukan karena sesuai dengan histori data kependudukan dan kondisi Indonesia (Preston, 2004). Melalui program mortpack, dihasilkan estimasi angka harapan hidup empat tahun sebelum tahun survey. Untuk mendapatkan angka harapan hidup pada tahun survey dilakukan fitting model dari beberapa data history. Untuk mendapatkan data harapan hidup waktu lahir 2011, fitting model dilakukan dengan menggunakan beberapa sumber data yaitu SP 2000, SP 2010, SUSPAS 2005, Susenas 2007-2011.

Setelah mendapatkan angka harapan hidup, selanjutnya dihitung indeks harapan hidup dengan membandingkan angka tersebut dengan angka standar UNDP, dimana UNDP telah menetapkan angka harapan hidup minimum dan maksimum, yaitu masing-masing adalah 25 tahun dan 85 tahun.

b. Pengetahuan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan atau pencapaian pendidikan penduduk digunakan dua indikator yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Informasi mengenai angka melek huruf, tidak saja penting karena berkaitan erat dengan tingkat kecerdasan seseorang atau masyarakat, tetapi juga sangat menentukan terutama dalam hal kemampuan beradaptasi yang bersangkutan terhadap penguasaan teknologi, komunikasi dan kemampuan dalam melakukan perhitungan-perhitungan secara sederhana. Sedangkan rata-rata lama sekolah dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan. Semakin lama rata-rata tahun pendidikan penduduk di suatu wilayah, semakin tinggi pula mutu sumber daya manusianya.¹⁹

c. Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan produk nasional bruto (PNB) per kapita riil yang disesuaikan. Sedangkan untuk pengukuran standar hidup layak di Indonesia, BPS menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan.²⁰

¹⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten 2011*, (Banten: CV. Ardilaya, 2011) h. 11

²⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten 2011...*, h. 15

3. Penyusunan IPM

Untuk memperoleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dilakukan 2

(dua) tahapan penghitungan sebagai berikut : Tahap pertama, dilakukan

penghitungan indeks masing-masing komponen pembentuk IPM yaitu :

indeks harapan hidup, indeks pengetahuan, dan indeks daya beli.

Untuk

setiap komponen, cara penghitungan indeksnya adalah sama, yaitu dengan

membandingkan nilai masing-masing komponen dengan standar maksimum

dan minimum yang telah ditetapkan.

Rumus yang digunakan untuk penghitungan indeks masing-masing komponen IPM adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks } X_i = \frac{(X_i - X_{(i-\min)})}{(X_{(i-\max)} - X_{(i-\min)})}$$

Dimana :

X_i = Komponen IPM ke- i

$X_{(i-\min)}$ = Nilai minimum komponen IPM ke- i

$X_{(i-\max)}$ = Nilai maksimum komponen IPM ke- i

Persamaan tersebut akan menghasilkan $0 \leq \text{Indeks } X_i \leq 1$, untuk mempermudah membaca nilai indeks tersebut, maka persamaan itu

dikalikan 100, sehingga nilai indeksnya adalah $0 \leq \text{Indeks } X_i \leq 100$.

Tahap kedua, adalah penghitungan IPM dengan merata-ratakan jumlah masing-masing indeks komponen IPM. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{IPM} = \frac{1}{3} (X_1 + X_2 + X_3)$$

Dimana :

X1 = Indeks harapan hidup

X2 = Indeks pengetahuan

X3 = Indeks daya beli.²¹

Tabel 2.1

Dimensi	Metode Lama	Metode Baru
Umur panjang dan hidup sehat	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH) Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar hidup layak	PDB Per Kapita	PNB Per Kapita
Agregasi	Rata-rata Aritmatik	Rata-rata Geometrik

²¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten 2012*, (Banten: CV. Ardilaya, 2012) h. 23

Tabel di atas adalah perbedaan antara metode lama dengan metode baru indeks pembangunan manusia. Seiring dengan perubahan metodologi yang dilakukan oleh UNDP sejak tahun 2010 sampai tahun 2013, Indonesia sebagai official statistics pun mulai 2015 ini turut mengadopsi IPM Metode Baru.

4.Komponen IPM Metode Baru

A. Umur Panjang dan Sehat

Sebenarnya cukup banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat. Namun dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara umum, maka UNDP memilih indikator Angka Harapan Hidup waktu lahir (life expectancy at birth) sebagai proxy nya.

Angka harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Secara teori, semakin baik kesehatan seseorang maka kecenderungan untuk bertahan hidup lebih lama akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin buruk kesehatannya maka umur kehidupan orang tersebut akan semakin pendek. Dengan demikian, angka harapan hidup diharapkan dapat menggambarkan dimensi umur panjang dan sehat. Angka Harapan Hidup dihitung melalui pendekatan tak langsung (indirect estimation), dengan menggunakan data Anak Kandung Lahir Hidup dan Anak Kandung Masih Hidup. Penghitungan angka harapan hidup menggunakan paket program Mortpack dengan metode Trussel dan model West. Pemilihan metode ini dilakukan karena sesuai dengan histori data kependudukan dan kondisi umum Indonesia (Preston, 2004). Melalui program Mortpack, dihasilkan estimasi angka harapan

hidup empat tahun sebelum tahun sensus atau survei. Untuk mendapatkan angka harapan hidup pada tahun sensus atau survei, dilakukan Fitting model dari beberapa data historis. Angka Harapan Hidup sendiri dihitung dengan menggunakan data Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2010. Setelah mendapatkan Angka Harapan Hidup, selanjutnya dihitung Indeks Angka Harapan Hidup. Penghitungannya dilakukan dengan cara membandingkan angka tersebut dengan angka standar UNDP, yaitu angka harapan hidup minimum dan maksimum. Kedua angka standar tersebut masing-masing mencapai 20 tahun dan 85 tahun.

B. Pengetahuan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan atau pencapaian pendidikan penduduk digunakan dua indikator, yakni Harapan Lama Sekolah dan Ratarata Lama Sekolah. Informasi mengenai Harapan Lama Sekolah, sangat penting karena dapat mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dan perluasan kesempatan dalam bidang pendidikan di suatu wilayah. Adapun Rata-rata Lama Sekolah dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan. Semakin lama rata-rata tahun pendidikan penduduk di suatu wilayah, akan semakin tinggi pula mutu sumber daya manusia nya.

B.1. Harapan Lama Sekolah

Yang dimaksud dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar, dengan sumber data dari Survei

Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

B.2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selain itu, juga untuk mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP. Sama seperti HLS, sumber data yang digunakan untuk menghitung RLS adalah Susenas.

RLS dihitung dengan mengolah dua variabel secara simultan, yaitu jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat/kelas pendidikan yang sedang/pernah diduduki. Penghitungan rata-rata lama sekolah dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, dihitung lama sekolah untuk masing-masing individu dengan menggunakan pola hubungan antar variabel.

Tahap selanjutnya dihitung rata-rata lama sekolah untuk keseluruhan individu. Adapun formula untuk lama sekolah adalah :

$$\text{Lama Sekolah} = \text{Konversi Tahun} + \text{Tingkat/Kelas Tertinggi yang pernah/sedang diduduki} - 1$$

B.3. Indeks Pengetahuan

Untuk memperoleh indeks pengetahuan atau indeks pencapaian

pendidikan, Indeks HLS dan Indeks RLS digabung menjadi satu dengan perbandingan yang sama, yaitu :

$$\text{Indeks Pengetahuan} = 1/2 \text{ Indeks HLS} + 1/2 \text{ Indeks RLS}$$

Apabila dikalikan 100, maka Indeks ini akan bernilai antara 0 (keadaan terburuk) dan 100 (keadaan terbaik).

C. Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Untuk pengukuran standar hidup layak di Indonesia, BPS menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita setahun disesuaikan.

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Dimana, rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, yang dibuat konstan/riil dengan tahun menggunakan dasar tahun 2012 (2012=100). Perhitungan paritas daya beli menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan.

Untuk menjamin keterbandingan yang standar baik antar daerah maupun secara runtun waktu (tahun), beberapa tahapan prosedur yang harus ditempuh dalam penghitungan pengeluaran per kapita setahun disesuaikan adalah sebagai berikut :

- 1). Menghitung pengeluaran per kapita sebulan dari Susenas (=A)
- 2). Mengkonversi nilai A menjadi pengeluaran per kapita setahun dalamribuan (=B).
- 3). Mendeflasikan nilai B dengan IHK (2012=100) yang sesuai (=C).

- 4). Menghitung Daya beli penduduk (Purchasing Power Parity, PPP/unit). Penghitungannya menggunakan Metode Rao, dengan data dasar adalah data harga dan kuantum dari suatu basket komoditi yang terdiri dari nilai 96 komoditi.
- 5). Membagi nilai C dengan PPP/unit (=D).

5. Penyusunan IPM Metode Baru

Untuk memperoleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dilakukan 2 (dua) tahapan penghitungan sebagai berikut : Tahap pertama, dilakukan penghitungan indeks masing-masing komponen pembentuk IPM yaitu : Indeks AHH, Indeks Pengetahuan, dan Indeks Pendapatan. Untuk setiap komponen, cara penghitungan indeksnya adalah sama, yaitu dengan membandingkan nilai masing-masing komponen dengan standar maksimum dan minimum yang telah ditetapkan. Rumus yang digunakan untuk penghitungan Indeks AHH, Indeks HLS, dan Indeks RLS adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks } X_i = \frac{(X_i - X_{(i-\min)})}{(X_{(i-\max)} - X_{(i-\min)})}$$

Dimana :

X_i = Komponen IPM ke-i

$X_{(i-\min)}$ = Nilai minimum komponen IPM ke-i

$X_{(i-\max)}$ = Nilai maksimum komponen IPM ke-i

Rumus yang digunakan untuk penghitungan Indeks Pendapatan (Indeks Y) adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks } Y = \frac{[L_n(y) - L_n(y_{\min})]}{[L_n(y_{\max}) - L_n(y_{\min})]}$$

Dimana :

y = Pengeluaran per Kapita Setahun Disesuaikan

y_{\min} = Nilai minimum komponen Pengeluaran per Kapita Setahun
Disesuaikan

y_{\max} = Nilai maksimum komponen Pengeluaran per Kapita Setahun
Disesuaikan.²²

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan aspek-aspek penelitian tentang ‘‘pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di provinsi banten’’, diantaranya adalah :

Ravi Dwi Wijayanto, C2B606044, ‘‘Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten/ Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008’’. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier panel data dengan metode FEM dengan bantuan software Eviews 6. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) Jumlah Penduduk, PDRB, Pendidikan, pengangguran dan dummy tahun terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008 menunjukkan bahwa besarnya nilai R^2 cukup tinggi yaitu 0,968. Nilai ini berarti bahwa model yang dibentuk cukup baik dimana 96,8 persen variasi variabel dependen kemiskinan dapat dijelaskan dengan baik oleh kelima variabel

²² Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten 2014*, h. 35

independen yakni PDRB, Pendidikan, pengangguran. Sedangkan 3,2 persen sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor diluar model.²³

Fatkhul Mufid Cholili, 0910210007, ‘‘Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin (studi kasus di 33 Provinsi di Indonesia)’’. Studi ini menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 6. Koefisien Regresi Parsial, Hipotesis Simultan, Estimasi model regresi. Hasil penelitian memperlihatkan adanya pengaruh secara simultan dari ketiga variabel independen dengan koefisien determinan 0.743 (R-Square). Namun ketika diuji secara parsial PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan IPM dan pengangguran secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.²⁴

Van Indra Wiguna, 0610213085, Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda (Ordinary Least Squares Regression Analysis) dengan menggunakan panel data melalui pendekatan efek tetap (Fixed Effect Model) dengan bantuan software E-Views 6. Pada model persamaan pengaruh jumlah penduduk, PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005 - 2010 dengan $n = 210$ dan $k = 3$, maka diperoleh degree of

²³ Ravi Dwi Wijayanto, C2B606044, ‘‘Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten/ Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008’’.

²⁴ Fatkhul Mufid Cholili, 0910210007, ‘‘Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin (studi kasus di 33 Provinsi di Indonesia)’’.

freedom (df) = 213 (n-k), dan menggunakan $\alpha = 5$ persen diperoleh nilai χ^2 tabel sebesar 124,34. Dibandingkan dengan nilai Jarque-Bera pada Gambar 6 sebesar 16,40643, maka dapat disimpulkan bahwa probabilitas gangguan μ_1 regresi terdistribusi secara normal, karena nilai Jarque-Bera lebih kecil dibandingkan nilai χ^2 tabel.²⁵

Adapun perbedaan penilitan dengan skripsi-skripsi yang diatas yang penulis lakukan dengan peneliti sebelumnya adalah :

- a) Pertama: *Lokasi tempat penelitian* berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penulis penulis melakukan penelitian di Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
- b) Kedua: *pokok masalah* yang diteliti oleh penulis berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Dalam hal ini penulis menekankan pokok permasalahan pada titik pengaruh dan seberapa besar pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di provinsi banten.

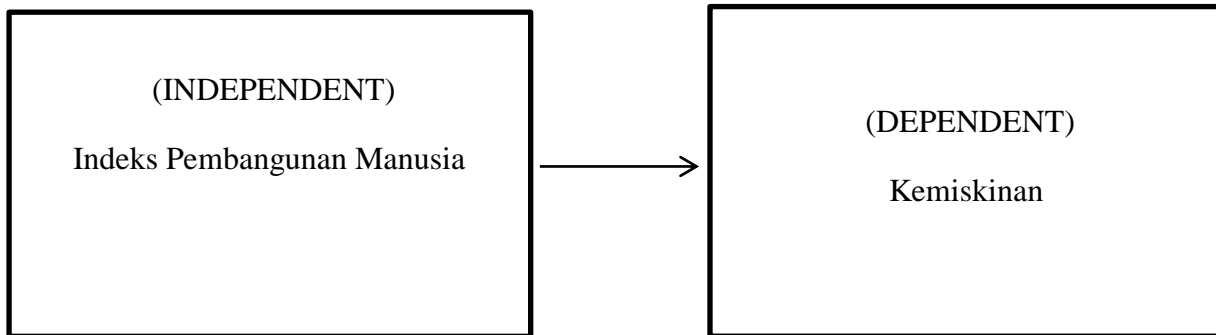
Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di provinsi banten 2011-2014, yaitu focus terhadap indeks pembangunan manusia dan pengaruhnya terhadap kemiskinan.

²⁵ Van Indra Wiguna, 0610213085, Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010.

D. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Antara Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan

Gambar 2.1
Hubungan Antar Variabel



Menurut Apriyati S. Napitupulu (2007), mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Indeks Pembangunan Manusia memiliki indikator komposit dalam penghitungannya antara lain angka harapan hidup, angka melek huruf, dan konsumsi per kapita.

Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan per kapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah.

Dan pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk

mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Ukuran kemiskinan yang sering digunakan untuk melihat fenomena kemiskinan di suatu daerah adalah insiden kemiskinan. Insiden kemiskinan dapat diartikan sebagai persentase penduduk yang memiliki pendapatan (atau proksi pendapatan) kurang dari jumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Walaupun demikian, sebenarnya kemiskinan memiliki banyak dimensi selain dimensi pendapatan. Dimensi lain kemiskinan dapat dilihat dari peluang memperoleh kesehatan dan umur yang panjang, peluang memiliki pengetahuan dan keterampilan, dan lain-lain. Intinya adalah kemiskinan sangat terkait dengan sempitnya kesempatan seseorang dalam menentukan pilihan-pilihan hidup. Jika kemiskinan berkait dengan semakin sempitnya kesempatan yang dimiliki, maka pembangunan manusia adalah sebaliknya.

Konsep pembangunan manusia adalah memperluas pilihan manusia terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli. Dengan hubungan yang berkebalikan tersebut, suatu daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang baik idealnya memiliki persentase penduduk miskin yang rendah.

Dalam hal ini persentase penduduk miskin suatu kabupaten/kota dikatakan tinggi bila lebih besar dari persentase penduduk miskin Banten (5,89 persen) dan dikatakan rendah bila lebih kecil dari nilai tersebut. Begitu juga IPM, dikatakan tinggi bila lebih besar dari IPM Banten (69,89) dan dikatakan rendah bila

lebih kecil dari nilai tersebut. Sehingga pengkategorian disini bersifat relatif.²⁶

1. Persentase penduduk miskin dan IPM tinggi. Kabupaten/kota dalam kategori ini memiliki kapabilitas manusia yang relatif baik meskipun dengan penduduk miskin yang relatif banyak. Konsentrasi lebih besar perlu diberikan untuk menekan angka kemiskinan. Hal yang mungkin dilakukan yaitu dengan menerapkan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan pendapat dan peningkatan daya beli masyarakat. Tidak ada kabupaten/kota yang termasuk kedalam kelompok ini.
2. Persentase penduduk miskin dan IPM rendah. Kabupaten/Kota dalam kategori ini telah cukup berhasil dalam menekan angka kemiskinannya namun belum cukup berhasil dalam pencapaian kapabilitas penduduk. Upaya lebih besar perlu dilakukan untuk mengejar ketertinggalan capaian pembangunan manusia yaitu dengan perhatian yang lebih besar pada peningkatan kapabilitas dasar penduduk. Kabupaten/kota yang termasuk ke dalam kelompok ini hanyalah Kabupaten Serang.
3. Persentase penduduk miskin tinggi dan IPM rendah. Kondisi kabupaten/kota dalam kategori ini adalah kondisi yang paling kurang. Diperlukan usaha yang lebih untuk dapat mengejar ketertinggalannya dalam menekan angka kemiskinan dan mempercepat capaian pembangunan manusia. Kabupaten/kota yang termasuk kedalam kelompok ini adalah kabupaten pandeglang dan kabupaten lebak.

²⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten 2014...*, h. 57

4. Persentase penduduk miskin rendah dan IPM tinggi. Kondisi kabupaten/kota dalam kategori ini adalah kondisi yang ideal. Kategori ini mampu menekan angka kemiskinan dan disaat yang sama mampu meraih capaian pembangunan manusia yang tinggi. Kabupaten/kota yang termasuk kedalam kelompok ini adalah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan.²⁷

Tabel 2.2

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)			
	2011	2012	2013	2014
Kab Pandeglang	117.6	109.1	121.1	113.1
Kab Lebak	115.2	106.9	118.6	115.8
Kab Tangerang	188.6	176	183.9	173.1
Kab Serang	82	76.1	72.8	71.4
Kota Tangerang	114.3	106.5	103.1	98.8
Kota Cilegon	15.4	15	15.9	15.5
Kota Serang	37.4	34.7	36.7	36.2
Kota Tangerang Selatan	20.1	18.7	25.4	25.3
Provinsi Banten	690.9	642.9	677.5	649.2

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di provinsi banten tahun 2011 - 2014 terbanyak yaitu berada di Kabupaten Tangerang yaitu sebanyak 188.6 ribu jiwa di tahun 2011 dan mengalami penurunan hingga 173.1 ribu jiwa

²⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten 2014...*, h. 59

di tahun 2014. dan kabupaten/Kota yang memiliki persentase penduduk miskin paling sedikit yaitu di Kota Cilegon yaitu sebanyak 15.4 ribu jiwa di tahun 2011.

Tabel 2.3

Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota (ribu rupiah/tahun)			
	2011	2012	2013	2014
Kab Pandeglang	7395	7426	7486	7589
Kab Lebak	7819	7859	7918	7977
Kab Tangerang	11631	11640	11648	11666
Kab Serang	9722	9777	9831	9886
Kota Tangerang	13500	13515	13531	13671
Kota Cilegon	11784	11852	11920	12057
Kota Serang	11834	11880	11950	12091
Kota Tangerang Selatan	14037	14131	14207	14361
Provinsi Banten	10933	11008	11061	11150

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Tabel 2.3 di atas menunjukkan bahwa IPM dalam pengeluaran per kapita provinsi banten tahun 2011 - 2014 terbanyak yaitu berada di Kota Tangerang Selatan yaitu sebanyak 14.207 ribu rupiah di tahun 2013 dan mengalami peningkatan hingga 14.361 ribu rupiah di tahun 2014. dan kabupaten/Kota yang memiliki persentase IPM dalam pengeluaran perkapita paling sedikit yaitu di Kabupaten Pandeglang yaitu sebanyak 7.395 ribu rupiah di tahun 2011.